

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang mewajibkan setiap unit kerja sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Inspektorat II sebagai bagian unit kerja Inspektorat Jenderal dan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang pengawasan, memiliki kewajiban dalam mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 105 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional, dan Inspektorat Jenderal..

Realisasi Keuangan pada tahun 2015 sebesar Rp.3.498.259.100 atau 99,02% dari anggaran Rp 3.533.052.000 dengan capaian kinerja sebagai berikut :

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	<3%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Nilai Sakip 74,03 Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen	Itjen B, KII B, BIM B, Persen : 100%
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	73,02%

4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker	BIM, KII, Itjen, BBLM, ATI padang, BDI Medan (6 satker)
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi
Perspektif Proses Internal				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91%
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	95%
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen	40%
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 Orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	88,5%
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP B	Nilai : 70,59 Predikat B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen	99,02%

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Tahun 2015 merupakan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan tugas Inspektorat II selama tahun 2015, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya selaku Inspektur II mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II pada tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 19 Januari 2016

INSPEKTUR II

EDY WASPAN

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
B. Peran Strategik Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	2
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	3
A. Rencana Strategik Organisasi	3
B. Rencana Kinerja Tahun 2015	6
C. Rencana Anggaran Tahun 2015	8
D. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Analisis Capaian Kinerja	12
B. Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV : PENUTUP	26
Tinjauan Umum Keberhasilan dan Permasalahan/Kendala	26
A. Keberhasilan	26
B. Permasalahan / Kendala	26
C. Upaya dan Strategi Pemecahan	26
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.105/M-IND/PER/10/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional, dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat II.

B. PERAN STRATEGIK ORGANISASI

Peran Strategik Inspektorat II sebagaimana yang tercantum dalam peran strategik Inspektorat Jenderal yaitu :

1. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN.

2. Paradigma baru pengawasan memfokuskan pada pembimbingan -pendampingan dan pengawasan sebagai mitra manajemen dengan melakukan bimbingan maupun konsultasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.
3. Pelimpahan hampir seluruh tugas sektor Industri kepada pemerintah daerah, merupakan cermin dari konsistensi Kementerian Perindustrian dalam mengaktualisasikan Peraturan / Perundang-Undangan. Namun demikian, dari sisi pengawasan masih terdapat perbedaan pemahaman yang berimplikasi terhadap pengawasan yang dilakukan pemerintah. Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut melalui PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka pengaturan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi lebih jelas.
4. Dalam menyikapi perkembangan paradigma pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Inspektorat II memiliki peran strategis dalam rangka mendayagunakan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.105/M-IND/PER/10/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
 - Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat II.
 - Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK ORGANISASI

Perencanaan strategik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Inspektorat II sebagai bagian dari unit kerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengawas Intern Kementerian Perindustrian adalah "Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri".

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
- c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kementerian Perindustrian, untuk:

- a. Menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN; dan
- c. Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

4. Strategi pengawasan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka strategi pengawasan yang digunakan adalah :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional;
- c. Mempercepat tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh unsur pengawasan;
- e. Meningkatkan profesionalitas dan kemandirian aparatur pengawasan;
- f. Meningkatkan budaya pengawasan.
- g. Melakukan pengawasan sesuai Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Untuk itu telah ditetapkan sasaran pengawasan yaitu meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran serta pemborosan keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian, telah disusun kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian sebagai berikut :

1. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

2. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

3. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

4. Kebijakan Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- b. Menerapkan audit berbasis resiko.

5. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat maupun di daerah, serta Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan

sebanyak 15 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 3 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 12 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 8 Unit.

6. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sumber daya manusia serta sistem/prosedur kerja (SOP)
- b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, analisis kebutuhan BMN, Pencatatan dan Inventarisasi BMN, Sistem pengamanan terhadap penyimpanan BMN, Prosedur Penghapusan BMN.
- c. Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit penerapan *e-licensing*, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2015 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Pemangku Kepentingan			
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen

3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan
Perspektif Proses Internal			
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP
Perspektif Pembelajaran Organisasi			
1	Meningkatnya kemampuan SDM APiP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat II pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat II :
 - a. Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal.
 - b. Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian.
 - c. Pengawasan Untuk Tujuan tertentu/Riksus;
2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspektorat II pada Semester I dan Semester II;
3. Pelaksanaan Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi;
4. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Monev Revitalisasi Pabrik Pupuk Organik;
6. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;
7. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II;

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015

Inspektorat II pada tahun 2015 mempunyai Kegiatan "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II" dengan anggaran sebesar Rp. 3.533.052.000,- yang terdiri dari Laporan Hasil Audit Inspektorat II, Laporan Hasil Reviu Inspektorat II, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II, Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN		VOLUME	TOTAL
1842.001	LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT II	24,00 LAPORAN	1.370.778.000
1842.001.001	LAPORAN PENGAWASAN KINERJA UNIT PUSAT DAN VERTIKAL INSPEKTORAT II		782.711.000
011	PERSIAPAN PENYUSUNAN PKA/KKA		20.042.000
012	PELAKSANAAN AUDIT		739.187.000
013	PENYUSUNAN LHA		23.482.000
1842.001.002	LAPORAN PENGAWASAN DEKONSENTRASI PERINDUSTRIAN INSPEKTORAT II		437.041.000
011	PERSIAPAN PENYUSUNAN PKA/KKA		7.016.000
012	PELAKSANAAN AUDIT		420.505.000

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN		VOLUME	TOTAL
013	PENYUSUNAN LHA		9.520.000
1842.001.004	LAPORAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU/ RIKSUS INSPEKTORAT II		151.026.000
011	PERSIAPAN PENYUSUNAN PKA/KKA		2.481.000
012	PELAKSANAAN PENGAWASAN		145.725.000
013	PENYUSUNAN PENGAWASAN		2.820.000
1842.002	LAPORAN HASIL REVIU INSPEKTORAT II	34,00 LAPORAN	684.102.000
1842.002.001	LAPORAN HASIL REVIU KEUANGAN BMN UNIT PUSAT & VERTIKAL INSPEKTORAT II		634.214.000
011	PERSIAPAN REVIU		27.106.000
012	PELAKSANAAN REVIU		571.042.000
013	PELAPORAN HASIL REVIU		36.066.000
1842.002.002	LAPORAN HASIL REVIU RKAKL		49.888.000
011	PERSIAPAN REVIU		1.624.000
012	PELAKSANAAN REVIU		46.240.000
013	PELAPORAN HASIL REVIU		2.024.000
1842.003	LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI INSPEKTORAT II	2,00 LAPORAN	893.170.000
1842.003.001	LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSPEKTORAT II		12.156.000
011	PERSIAPAN PENYELENGGARAAN MONEV		2.646.000
012	PELAKSANAAN MONEV		6.000.000
013	PENYUSUNAN LAPORAN		3.510.000
1842.003.002	LAPORAN MONEV REVITALISASI PABRIK PUPUK ORGANIK		881.014.000
011	PEMBENTUKAN TIM MONEV		122.400.000
012	PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUASI		44.930.000
013	PELAKSANAAN		667.084.000
014	PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN		46.600.000
1842.004	LAYANAN MANAJEMEN PENGAWASAN INSPEKTORAT II	12,00 BULAN LAYANAN	462.020.000
011	MANAJEMEN PENGAWASAN INSPEKTORAT II		106.200.000
012	PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGAWASAN INSPEKTORAT II		108.320.000
013	KOORDINASI DAN KONSULTASI INTERNAL/EKSTERNAL PENGAWASAN INSPEKTORAT II		247.500.000
1842.005	DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT II	1,00 DOKUMEN	122.982.000
011	DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT II		106.200.000

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN		VOLUME	TOTAL
012	PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT II		16.782.000

D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara Inspektur II yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Inspektur Jenderal.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dokumen Penetapan Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Pemangku Kepentingan			
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan

Perspektif Proses Internal			
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP
Perspektif Pembelajaran Organisasi			
1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur II kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2015. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat II dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu :

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	<3%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Nilai Sakip 74,03 Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen	Itjen B, KII B, BIM B, Persen : 100%
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	73,02%

4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker	BIM, KII, Itjen, BBLM, ATI padang, BDI Medan (6 satker)
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi
Perspektif Proses Internal				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91%
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	95%
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen	40%
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 Orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	88,5%
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP B	Nilai : 70,59 Predikat B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen	99,02%

Dari indikator kinerja yang telah dilakukan penjelasan akan dijabarkan sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	<3%

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran kinerja tersebut adalah Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold <3%. Berdasarkan temuan BPK dengan total nilai sebesar Rp.8.830.323.972,43,- (0,33%) dari total anggaran sebesar Rp.2.656.276.729.000,- sehingga presentase temuan BPK masih dibawah materiality threshold sebesar 3%.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Nilai Sakip 74,03 Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen	Itjen B, KII B, , BIM B, Persen : 100%

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran kinerja tersebut adalah nilai SAKIP Kementerian dengan target Predikat B dan Presentase Nilai Sakip satuan kerja Eselon I wilayah Inspektorat II minimal B. SAKIP Kemenperin dinilai oleh KemenPAN dan RB dengan hasil 74,03. Penilaian SAKIP untuk unit eselon I Kementerian Perindustrian dilakukan oleh tim dari Inspektorat Jenderal berupa eselon I dan satu

eselon II pendamping yang kemudian dilakukan pleno dengan hasil yang tertera di atas. Semua unit eselon I wilayah cakupan Inspektorat II, mendapatkan nilai predikat B sehingga telah melampaui target sebesar 100%.

3. Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	73,02 persen

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran kinerja tersebut adalah Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum. Berdasarkan data hasil penilaian kinerja UPT di lingkungan BPPI tahun 2014, capaian peningkatan kualitas pelayanan publik persentase kepatuhan unit Balai Besar dan Baristand Industri binaan Inspektorat II melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan telah dilakukan pengukuran, dengan nilai 73,02, sehingga dengan target yang ditetapkan sebesar 75% belum tercapai. Adapun unit-unit Balai Besar dan Baristand yang ada di wilayah Inspektorat II sbb :

1. Balai Besar Kerajinan Batik
2. Balai Besar Logam dan Mesin
3. Baristand Industri Samarinda
4. Baristand Industri Medan
5. Baristand Industri Lampung

4. Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker	BIM, KII, Itjen, BBLM, ATI padang, BDI Medan (6 satker)

Salah satu indikator yang digunakan untuk memenuhi level 3 adalah pembuatan Peta Risiko satuan kerja. Satuan kerja yang telah membuat dan mengumpulkan peta risiko dianggap telah mencapai level 3. Untuk wilayah cakupan Inspektorat II, dari target sebanyak 5 satker, terealisasi sebanyak 6 satker yang telah menerapkan sistem pengendalian internal hingga level 3.

5. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran kinerja tersebut adalah Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti dengan target 1 rekomendasi kebijakan. Inspektorat II pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Mesin dan Peralatan Pupuk Organik. Secara umum rekomendasi dari hasil monev tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di tahun mendatang agar direncanakan secara optimal dan ditetapkan sebagai kebijakan Pimpinan melalui Peraturan Menteri Perindustrian.
2. Implementasi kebijakan pengembangan industri kedepan agar mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan dan dikendalikan secara memadai dengan menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta melakukan analisis risiko pada level operasional pelaksanaan programnya.
3. Melakukan pengendalian terhadap implementasi rencana aksi penyelesaian hibah yang saat ini sedang berlangsung dan melakukan koordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara terkait penyelesaian hibah/penghapusan mesin dan peralatan yang mengalami kerusakan berat atau hilang sesuai hasil inventarisasi kondisi dan kelengkapan mesin/peralatan.

4. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Industri Agro terkait penyelesaian hibah mesin dan peralatan pupuk organik TA 2010.

Perspektif Proses Internal

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Proses Internal				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91 %
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	95%
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP

Indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah Presentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT dengan target 90%, Presentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan dengan target 80%, dan Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT 90 % dan Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan 80% menunjukkan angka 91% dan 95%. Hal ini terjadi karena sampai dengan Triwulan IV pengawasan yang dilakukan sesuai dengan prosedur telah dilakukan sesuai jadwal PKPT dan kegiatan pengawasan tersebut juga telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan prosedur.

Sedangkan indikator Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian nilai WTP, telah tercapai karena opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Perindustrian telah dibawah dengan threshold 3%.

Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya kemampuan SDM APIP

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen	6 orang
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	88,5
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat II	Nilai SAKIP B	Nilai : 77 Predikat B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen	99,02%

Indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal dalam hal ini Inspektorat II dengan target 90%, Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dengan target 4 orang dan Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan dengan target 90%.

Dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan kemampuan SDM APIP melalui kegiatan Layanan Manajemen mencapai 42,86% karena dari total pegawai Inspektorat II hanya 6 orang pegawai yang mengikuti diklat sampai dengan Triwulan IV sehingga target 90% belum tercapai.

Pada sasaran meningkatnya kemampuan SDM APIP, jumlah auditor yang menulis

artikel atau karya tulis yang di publikasikan (majalah Solusi) tahun 2015 sebanyak 4 orang, dengan target 4 orang, sehingga sasaran telah tercapai. Sedangkan Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan untuk wilayah cakupan Inspektorat II mendapatkan nilai 88,5% sehingga target 90% belum tercapai.

2. Organisasi yang efektif

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat II	Nilai SAKIP B	Nilai : 77 Predikat B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	1 sertifikat

Indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat II dengan target nilai SAKIP B dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dengan target 1 sertifikat. Nilai efektifitas organisasi Inspektorat II dapat diukur berdasarkan nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II sebesar 77 setara dengan predikat B, sedangkan penerapan sistem manajemen ISO 9001:2008 telah menghasilkan 1 sertifikat.

3. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen	99,02%

Indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah Presentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target 85% dan Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal untuk cakupan Inspektorat II dengan target sebesar 90%. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan Inspektorat II telah mencapai 100%. Hal ini terlihat dari kesesuaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Inspektorat II dengan perencanaan kegiatan yang terealisasi seluruhnya sedangkan tingkat penyerapan anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar 99,02% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga sasaran ini tercapai.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015

Capaian Kinerja Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)				
1	Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Tingkat Penurunan penyimpangan minimal	12 persen	15,19%
		Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	15 satker	15 satker
2	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan	Menurunnya jumlah temuan berulang dari tahun sebelumnya	20 persen	22,86%
		Temuan auditor eksternal dan pengaduan masyarakat berkurang dari tahun sebelumnya	3 persen	Belum dapat diukur karena belum ada laporan interim dari BPK
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai indeks integritas dari KPK	6.7 indeks	7,32
4	Meningkatnya akuntabilitas aparatur dan kinerja pengembangan industri	Nilai LAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I	65 Skor	Nilai LAKIP untuk Kementerian Perindustrian belum dipublikasikan; Nilai untuk Itjen : 73,23 dan Rata-Rata Eselon I : 61,94
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)				
1	Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN Itjen yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	90 persen	97,87 persen
2	Meningkatkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri	Tingkat penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri	20 persen	0 persen
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry	1 rekomendasi	2 rekomendasi
		Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan	1 laporan	2 laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)				
1	Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang kompeten	SDM pengawasan yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya (bersertifikat)	90 persen	100 persen
2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan	85 persen	100 persen

Capaian Kinerja Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)				
1	Meningkatnya akuntabilitas aparatur dan kinerja Kementerian Perindustrian	Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Dalam Cakupan Tugas	70 (Predikat B)	Nilai Kemenperin : 73,11. Nilai untuk : 1. Ditjen Agro : 77,84; 2. Ditjen PPI : 74,71; 3. BPKIMI : 73,74; 4. Ditjen KII : 73,35; 5. Setjen : 73,11; 6. Ditjen IUBTT : 72,21; 7. Ditjen BIM : 72,06; 8. Ditjen IKM : 70,14; 9. Itjen : 68,02
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	84,6 persen
3	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang professional	Tingkat kualitas laporan keuangan	4 Opini BPK (WTP=4)	Opini BPK WTP
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)				
1	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan	80 persen	95 persen
2	Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
3	Meningkatnya kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan	Persentase permasalahan yang dapat ditangani	85 persen	100 persen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal dan unit-unit Eselon II Inspektorat Jenderal	70 (Predikat B)	Nilai untuk Itjen : 68,02 1. Nilai untuk Setitjen : 90 2. Nilai untuk Ins 1 : 85,65 3. Nilai untuk Ins 2 : 65,62 4. Nilai untuk ins 3 : 82,12 5. Nilai untuk Ins 4 : 76,51
		Tingkat Penyerapan Anggaran	90 persen	96,34 persen

Capaian Kinerja Tahun 2015

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	<3%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Nilai Sakip 74,03 Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen	Itjen B, KII B, BIM B, Persen : 100%
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	73,02%
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker	BIM, KII, Itjen, BBLM, ATI padang, BDI Medan (6 satker)
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi
Perspektif Proses Internal				

1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91%
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	95%
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen	40%
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 Orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	88,5%
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP B	Nilai : 70,59 Predikat B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen	99,02%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran TA 2015 sebesar Rp 3.498.259.100 atau 99,02% dari anggaran Rp 3.533.052.000 berdasarkan data E-monitoring dan Laporan ALKI. Pada saat penyusunan laporan terdapat perbedaan realisasi keuangan antara data dari laporan triwulan dengan e-monitoring. Rendahnya realisasi pada Monitoring Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakup) Inspektorat II sebesar Rp 3.900.000 (32,08%) dari anggaran Rp 12.156.000 dikarenakan ada sisa dari

perjalanan dinas yang kegiatannya dilaksanakan di dalam kota.

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI		SISA
			TOTAL	%	
1842	Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.533.052.000	3.498.259.100	99,02	34.792.900
1842.001	Laporan Hasil Audit Inspektorat II	1.370.778.000	1.365.272.400	99,60	5.505.600
1842.001.001	Laporan Pengawasan Kinerja Unit Pusat Dan Vertikal Inspektorat II	782.711.000	782.471.000	99,97%	240.000
1842.001.002	Laporan Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian Inspektorat II	437.041.000	435.631.400	99,68%	1.409.600
1842.001.004	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu/ Riksus Inspektorat II	151.026.000	147.170.000	97,45%	3.856.000
1842.002	Laporan Hasil Reviu Inspektorat II	684.102.000	675.471.600	98,74	8.630.400
1842.002.001	Laporan Hasil Reviu Keuangan Bmn Unit Pusat & Vertikal Inspektorat II	634.214.000	627.723.600	98,98%	6.490.400
1842.002.002	Laporan Hasil Reviu Rkaki	49.888.000	47.748.000	95,71%	2.140.000
1842.003	Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat II	893.170.000	878.875.000	98,40	14.295.000
1842.003.001	Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Inspektorat II	12.156.000	3.900.000	32,08%	8.256.000
1842.003.002	Laporan Monev Revitalisasi Pabrik Pupuk Organik	881.014.000	874.975.000	99,31%	6.039.000
1842.004	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	462.020.000	456.358.100	98,77	5.661.900
11	Manajemen Pengawasan Inspektorat II	106.200.000	106.200.000	100,00%	0
12	Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	108.320.000	102.720.000	94,83%	5.600.000
13	Koordinasi Dan Konsultasi Internal/Eksternal Pengawasan	247.500.000	247.438.100	99,97%	61.900
1842.005	Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II	122.982.000	122.282.000	99,43	700.000
11	Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II	106.200.000	106.200.000	100,00%	0
12	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja	16.782.000	16.082.000	95,83%	700.000
	TOTAL	3.533.052.000	3.498.259.100	99,02	34.792.900

Realisasi berdasarkan Laporan ALKI TA 2015

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1842.001 - Layanan Audit Inspektorat II	1.370.778.000	90,00%	93,42%	100,00%	100,00%
2.	1842.001 - Layanan Reviu Inspektorat II	684.102.000	90,00%	95,50%	100,00%	100,00%
3.	1842.001 - Layanan Moitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II	893.170.000	90,00%	88,00%	100,00%	100,00%
4.	1842.002 - Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	462.020.000	85,31%	73,75%	100,00%	100,00%
5.	1842.002 - Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II	122.982.000	90,00%	73,59%	100,00%	100,00%
	TOTAL	3,533,052,000	89,91%	89,19%	100,00%	100,00%

BAB IV

PENUTUP

TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KENDALA

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II tahun 2015, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II tahun 2015 telah berjalan baik, tercermin dari terealisirnya Kegiatan Inspektorat II dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat II dalam tahun 2015 telah berjalan dengan baik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015, namun rendahnya nilai SAKIP sebesar 32,08% pada Inspektorat II akan menjadi perhatian untuk perbaikan di tahun mendatang.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II tahun 2015 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan masih mengalami penundaan jadwal dikarenakan adanya audit dari BPK RI dan adanya penyesuaian jadwal karena ada kegiatan pada Sekretariat Itjen.
2. Rendahnya realisasi pada Monitoring Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip) Inspektorat II sebesar Rp 3.900.000 (32,08%) dari anggaran Rp.12.156.000.- dikarenakan ada sisa dari perjalanan dinas yang kegiatannya dilaksanakan di dalam kota.
3. Adanya perbedaan nilai realisasi keuangan yang tercantum dalam laporan triwulan dengan e-monitoring.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen dan melakukan penyesuaian PKPT

- terhadap jadwal pengawasan yang dilakukan untuk tahun 2016.
2. Melakukan perubahan/revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terlaksana sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih optimal.
 3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen terhadap permasalahan realisasi keuangan di tahun 2015 agar tidak terulang kembali.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, 19 Januari 2016

INSPEKTUR II

EDY WASPAN

LAMPIRAN